

Strategi Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Pelabuhan Indonesia

Safuan

Universitas Esa Unggul, Indonesia
safuan@esaunggul.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 19 September 2023

Disetujui : 6 Oktober 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

The port is the gateway to a country's economy, so the port must be clean from fraud. The purpose of this study is to determine the strategy developed by Pelabuhan Indonesia to prevent fraud. The method used in this research is qualitative method with a case study approach. The results and conclusions of this study are many studies on fraud prevention in the Indonesian port environment, even though Indonesian ports are one of the entry points for global trade. Therefore, Indonesian ports need an efficient fraud prevention system. The study findings show that Indonesian ports have implemented two fraud prevention strategies. The first strategy is strengthening governance within Pelindo, which includes: a) ratifying GCG guidelines; b) carrying out the signing of an integrity pact; c) gratuity control; d) a violation reporting system called "Pelindo Bersih"; e) socializing the implementation of corporate governance; and f) strengthening Pelindo's SMAP. The second strategy involves digitizing services such as Vessel Management System (VMS) and Vessel Traffic Service (VTS), as well as land ones such as Terminal Operating System (TOS), Multipurpose Terminal Operating System (MP-TOS), Car Terminal Operating System (CTOS), Autogate System, Single Truck Identification Data System (STID), Behandle Management System (BMS), and from the customer side such as e-Service developed into i-Hub to minimize national logistics costs, Lower the risk of fraud, and compete on a global scale.

Keywords: control, GCG, fraud, port, prevention, strategy.

PENDAHULUAN

Penipuan atau kejahatan ekonomi adalah tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah (Safuan, 2018). *Fraud* dapat terjadi di berbagai sektor termasuk di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Indonesia sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan internasional sangat penting untuk menjaga keamanan. Kejahatan seperti penipuan dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi perusahaan dan negara. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah melakukan studi yang dikutip oleh Deloitte, industri transportasi dan penyimpanan berada di urutan kedua sebagai industri yang menerima suap terbanyak (Deloitte, 2015).

Satu-satunya Badan Usaha Milik Negara untuk Bisnis Jasa Pelabuhan di Indonesia adalah PT. Pelabuhan Indonesia selanjutnya disebut Pelindo, yang membawahi 110 pelabuhan komersial. Dengan 16,7 juta TEUS pada tahun 2019, Pelindo berada di antara 10 operator terminal global dan internasional teratas (Embassy of The Republic of Indonesia & In Athens, 2022). Setelah merger, Pelindo akan memiliki 4 (empat) Sub-Holding, yaitu sebagai berikut: 1) Pelindo Terminal Peti Kemas; 2) Multi Terminal Pelindo; 3) Pelindo Solusi Logistics; 4) Pelindo Jasa Maritim (Pelindo, 2021).

Belum banyak penelitian terkait pencegahan *fraud* di lingkungan pelabuhan Indonesia, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti pencegahan kasus *fraud* khususnya di lingkungan pelabuhan Indonesia agar reputasi pelabuhan Indonesia dapat terjaga dan pelabuhan Indonesia turut menurunkan biaya logistik yang tinggi, yang disebabkan oleh kasus *fraud* (Safuan & Budiandru, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan *fraud* yang efektif di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Strategi ini mencakup berbagai tindakan pencegahan, deteksi, investigasi, dan penanganan penipuan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang ketat, melakukan pelatihan dan sosialisasi anti *fraud* kepada karyawan, menerapkan prinsip tata kelola yang baik, serta menyusun kebijakan dan prosedur anti *fraud* yang komprehensif (Corporate Secretary Division, 2023).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terpadu dan konsisten, diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya *fraud* di pelabuhan-pelabuhan Indonesia serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan diri para pelaku perdagangan internasional dalam bertransaksi dengan pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

STUDI LITERATUR

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) subjek kecurangan; tindakan penipuan; Ketidakjujuran; kecurangan (KKBI, 2023). *Fraud* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang berdampak negatif antara lain terhadap orang, organisasi, atau usaha dengan maksud untuk memperoleh keuntungan materi bagi kepentingan sendiri atau kelompok (Safuan, Budiandru, & Ismartaya, 2021). Bidang audit adalah yang berikutnya di mana hipotesis penipuan dikembangkan, dan mengandung unsur-unsur seperti tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Savilia & Laily, 2020). Ketika seseorang atau organisasi tertipu uang atau properti dengan menggunakan kebohongan, itu adalah penipuan (ACFE, 2023).

Menurut teori segitiga penipuan Donald R. Cressey, ada tiga alasan dasar mengapa penipuan terjadi. Tekanan adalah pertimbangan pertama. Seseorang dapat melakukan penipuan sebagai akibat dari tekanan eksternal (Wibowo & Pancawati, 2023). Menurut ide *Fraud Triangle*, seseorang sangat mungkin terlibat dalam tindakan penipuan jika ketiga komponen kebutuhan finansial yang tidak dapat dibagikan, peluang yang tampak, dan rasionalisasi hadir (ACFE, 2023).

Untuk melindungi diri dari kerugian moneter dan kerusakan reputasi, perusahaan harus menerapkan teknik pencegahan penipuan yang efektif. Berikut ini adalah beberapa metode praktis yang dapat digunakan perusahaan untuk memerangi penipuan: 1) Menerapkan kode etik: Sebuah penelitian oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyoroti pentingnya memiliki kode etik untuk menghindari penipuan. Ditemukan bahwa perusahaan dengan kode etik memiliki tingkat penipuan 50% lebih rendah daripada yang tidak memilikinya (ACFE Global, 2020); 2) Menerapkan Pengendalian Internal: *Institute of Internal Auditors* (IIA) menyarankan pengendalian internal harus digunakan untuk mencegah dan mengidentifikasi kecurangan dalam panduan mereka tentang pencegahan kecurangan untuk auditor internal (The Institute of Internal Auditors, 2009); 3) Melakukan Penilaian Risiko Kecurangan: Tujuan melakukan penilaian risiko penipuan adalah untuk memungkinkan perusahaan mengenali, mengevaluasi, dan mengelola risiko penipuan dengan menerapkan kontrol yang diperlukan (The Institute of Internal Auditors, 2009). 4) Mendidik Karyawan: ACFE menemukan bahwa perusahaan dengan pelatihan anti-penipuan untuk karyawan memiliki tingkat penipuan 50% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pelatihan tersebut, menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan untuk menghindari penipuan (ACFE Global, 2020); 5) Penggunaan teknologi: Penggunaan teknologi untuk menghentikan dan menangkap penipuan untuk bisnis yang mendukung penggunaan analitik data dan teknologi lainnya untuk mengawasi transaksi dan menemukan potensi penipuan (Bănărescu, 2015).

METODE

Metodologi penelitian strategi pencegahan *fraud* di lingkungan Pelabuhan Indonesia dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Bernard, Wutich, & Ryan, 2016). Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini: Tahap pertama dalam penelitian ini adalah studi literatur dari penelitian yang ada tentang pencegahan penipuan di pelabuhan Indonesia dan negara lain, teori terkait pencegahan penipuan, dan informasi terkait strategi pencegahan penipuan di pelabuhan Indonesia. Kemudian dilakukan pendataan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di pelabuhan Indonesia, seperti manajemen pelabuhan, petugas keamanan, dan karyawan pelabuhan lainnya. Selain itu, data juga dapat dikumpulkan melalui observasi langsung

di pelabuhan Indonesia dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis isi digunakan untuk menganalisis data kualitatif seperti wawancara dan dokumen.

Data yang dianalisis akan ditafsirkan untuk menemukan temuan yang relevan dalam pencegahan penipuan di pelabuhan Indonesia. Setelah itu, akan diambil kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian. Dan rekomendasi akan diberikan berdasarkan hasil riset untuk meningkatkan strategi pencegahan *fraud* di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Rekomendasi termasuk mengembangkan kebijakan dan prosedur, meningkatkan pengawasan, melatih karyawan, dan menerapkan teknologi keamanan.

HASIL

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 2 strategi pencegahan *fraud* yang telah diterapkan oleh pelabuhan Indonesia, antara lain: Pertama adalah Penguatan Tata Kelola di lingkungan Pelindo dimana telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: a) Pengesahan Pedoman Perangkat GCG; b) Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas; c) Pengendalian Gratifikasi; d) Sistem Pelaporan Pelanggaran "Pelindo Bersih"; e) Sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan; dan f) Penguatan SMAP Pelindo. Kedua adalah digitalisasi layanan (Corporate Secretary Division, 2023).

PEMBAHASAN

Pasca Merger, Pelindo telah mengesahkan seperangkat pedoman GCG yang kemudian disahkan oleh Subholding, antara lain: 1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2) Pedoman Manual Dewan; 3) Kode Etik Bisnis; 4) Pedoman Pengendalian Gratifikasi; dan 5) Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Corporate Secretary Division, 2023). Beberapa tampilan sampul perangkat pedoman GCG dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Alat Pedoman GCG
Sumber gambar : Cantumkan sumber gambar

GCG adalah prinsip yang memandu metode dan proses menjalankan bisnis sesuai dengan hukum, aturan, dan standar perilaku. GCG dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis suatu negara dan organisasi yang menggunakannya sangat terkait. Penerapan GCG mendorong persaingan yang sehat dan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, GCG bagi Pelindo harus dilaksanakan. Seluruh karyawan Pelindo wajib mengikuti Pedoman *Good Corporate Governance* perusahaan dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan untuk menegakkan standar moral yang tinggi dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku (Pelindo, 2022c).

Board Manual merupakan contoh dedikasi Perseroan untuk secara berkala menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk memenuhi tujuan dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Board Manual yang memuat pedoman bermanfaat bagi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan cara bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk menindaklanjuti komitmen mereka dalam menerapkan GCG di Perseroan. Board Manual harus

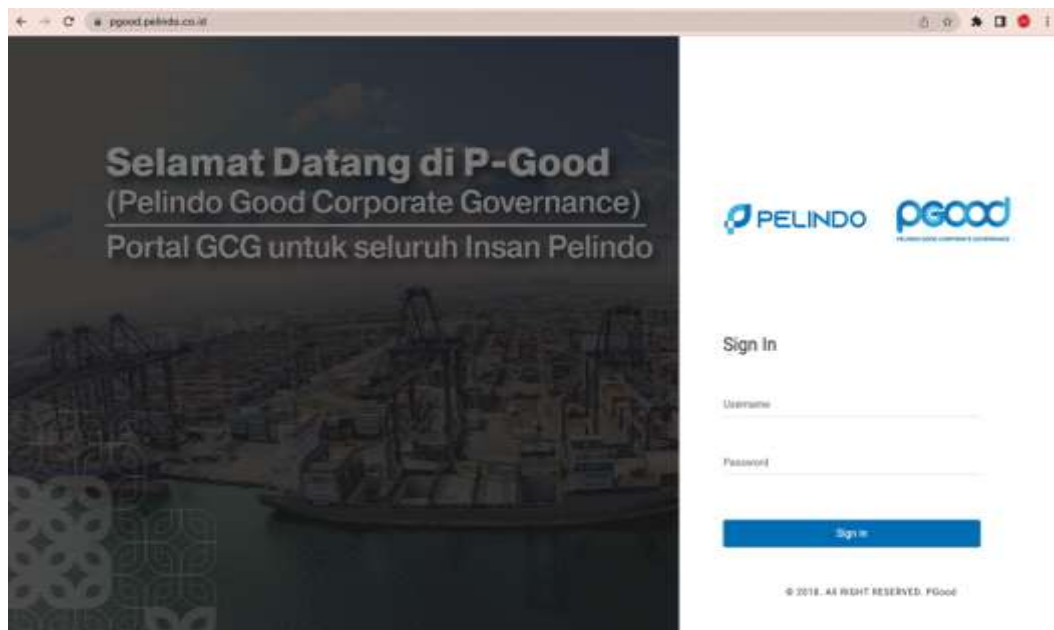
diperbarui untuk mencerminkan peraturan dan regulasi saat ini karena merupakan dokumen yang dinamis (Pelindo, 2022a).

Pedoman Perilaku Insan Pelindo merupakan bagian dari Etika Profesi dan Etika Kerja Pelindo People, yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, dan mengarahkan kesesuaian perilaku dengan nilai-nilai dan budaya Pelindo guna mencapai visi dan misi Pelindo. Kode Etik Bisnis ini membantu Pelindo People dalam menyelesaikan teka-teki moral yang mungkin timbul di tempat kerja (Pelindo, 2022b).

Diperlukan kebijakan untuk mengatur praktik gratifikasi karena Pelindo menyadari bahwa berbisnis dengan Pihak Ketiga sering kali berpapasan dengannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh karyawan Pelindo memahami bagaimana seharusnya penanganan gratifikasi dan mencegah karyawan Pelindo terlibat dalam praktik gratifikasi, termasuk penyuaipan (Pelindo, 2022d).

Tujuan Pelindo adalah menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pemerasan, kecurangan, dan korupsi. Untuk memaksimalkan keterlibatan staf dan mitra bisnis Pelindo dalam pengungkapan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran menguraikan manajemen teknis pengaduan tentang jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan Perusahaan (Pelindo, 2022e).

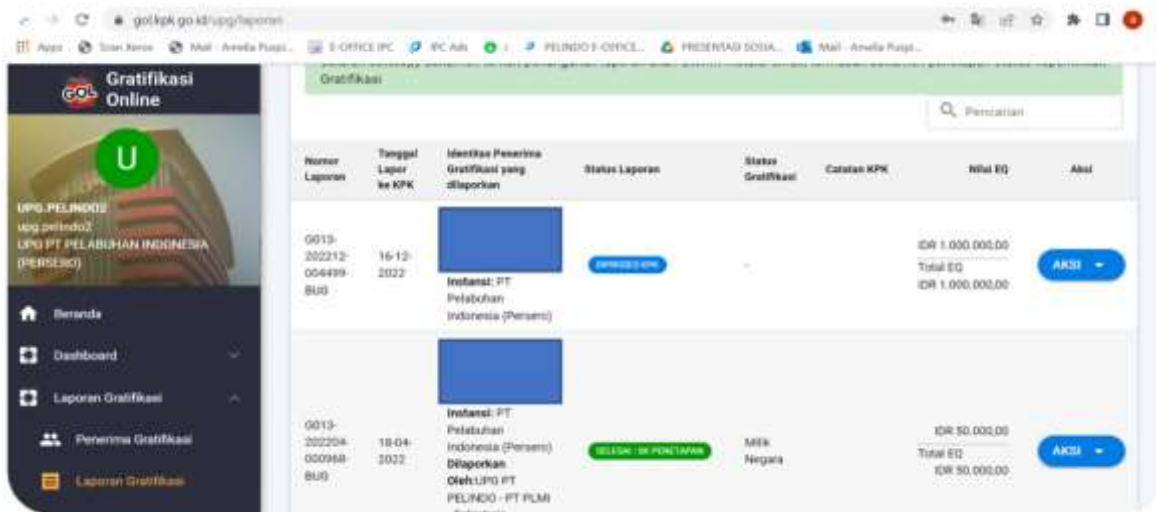
Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas merupakan kegiatan wajib bagi seluruh pegawai Pelindo, selain penandatanganan Pakta Integritas pegawai juga harus mengisi survei terkait pemahaman GCG. Penandatanganan dan pengisian survei dilakukan dengan mengakses aplikasi *P-Good*, yaitu aplikasi khusus yang dibangun agar pelaksanaan kegiatan GCG dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan memudahkan karyawan (Pelindo, 2018).



Gambar 2. Aplikasi *P-Good*
Sumber:

Pada tahun 2022, 100% karyawan Pelindo termasuk Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelesaikan survei GCG dan menandatangani pakta integritas (Corporate Secretary Division, 2023).

Manajemen menyampaikan surat imbauan larangan pungutan liar, pemberian dan penerimaan gratifikasi selama perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru kepada seluruh karyawan, serta mensosialisasikannya melalui media sosial perusahaan agar penyampaian informasi sampai kepada seluruh karyawan Pelindo. Selain itu, Pelindo juga memanfaatkan pengelolaan laporan gratifikasi melalui sistem KPK GOL (Corporate Secretary Division, 2023).



Gambar 3. Sistem KPK GOL
 Sumber:

Salah satu aplikasi Pelindo, bagi seluruh pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu tindakan yang berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo dan anak perusahaannya adalah *Whistleblowing System* yang independen. Karyawan atau stakeholder Pelindo yang maju akan dilindungi, baik dari sisi kerahasiaan identitas maupun dari potensi pembalasan oleh pihak pelapor (Safuan & Budiandru, 2019).

Jenis *fraud* yang dapat dilaporkan pada *Whistleblowing System* Pelindo Bersih adalah yang termasuk dalam kategori sebagai berikut; a) perbuatan curang, b) korupsi, c) pencurian, d) pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, e) benturan kepentingan, f) penyuapan, g) penggelapan, h) penipuan, i) pemerasan (Safuan & Budiandru, 2019).



Gambar 4. "Whistleblowing System" Pelindo Bersih
 Sumber: (Pelindo, 2020)

Penerapan GCG telah menjadi bahan upaya sosialisasi oleh Pelindo (Corporate Secretary Division, 2023). Sosialisasi merupakan tahapan yang digunakan untuk memperkenalkan seluruh elemen perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan GCG, khususnya yang terlibat secara khusus. Tim khusus yang akan dipimpin langsung oleh direktur pelaksana atau salah satu direktur yang ditunjuk di perusahaan harus dibuat untuk sosialisasi ini (Syofyan & Putra, 2020).

Praktik suap merupakan masalah hukum yang merajalela di sektor pelayanan publik. Salah satu instrumen terbaru yang digunakan untuk mencegahnya adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 (Fasa & Sani, 2022). Pelindo telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) yang merupakan standar ISO 37001-2016. Dalam menerapkan sistem ini, tidak hanya Pelindo sebagai holding tetapi Pelindo juga membutuhkan subholding, subholding subsidiaries, anak perusahaan portofolio bisnis lainnya hingga perusahaan yang terafiliasi dengan Pelindo (Corporate Secretary Division, 2023).

Karena semua pengguna layanan menginginkan layanan cepat, yang biasanya untuk menghindari ekonomi berbiaya tinggi, kepadatan pemeliharaan layanan ini memerlukan proses birokrasi yang panjang, dan semuanya hampir dalam bentuk monopoli atau hampir monopoli yang rentan terhadap penipuan (Iswanto, 2015). Pelindo telah mengembangkan beberapa teknologi digital baik dari sisi laut seperti Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic Service (VTS), sedangkan dari sisi darat seperti Terminal Operating System (TOS), Multipurpose Terminal Operating System (MP-TOS), Car Terminal Operating System (CTOS), Autogate System, Single Truck Identification Data System (STID), Behandle Management System (BMS) maupun dari sisi pelanggan seperti e-Service dikembangkan menjadi i-Hub sehingga Pelindo dapat berkolaborasi dengan ekosistem di Pelabuhan sehingga dapat bersaing di tingkat global, mengurangi risiko penipuan dan dapat berkontribusi menurunkan biaya logistik nasional (Safuan, 2023).

KESIMPULAN

Belum banyak penelitian tentang pencegahan penipuan di lingkungan pelabuhan Indonesia meskipun pelabuhan Indonesia menjadi salah satu pintu masuk perdagangan global. Oleh karena itu, pelabuhan Indonesia membutuhkan sistem pencegahan penipuan yang efisien. Temuan studi menunjukkan bahwa pelabuhan Indonesia telah menerapkan dua strategi pencegahan penipuan. Strategi pertama adalah penguatan tata kelola di lingkungan Pelindo, yang meliputi: a) meratifikasi pedoman GCG; b) melaksanakan penandatanganan pakta integritas; c) pengendalian gratifikasi; d) sistem pelaporan pelanggaran yang disebut "Pelindo Bersih"; e) mensosialisasikan pelaksanaan tata kelola perusahaan; dan f) penguatan SMAP Pelindo. Strategi kedua melibatkan digitalisasi layanan seperti Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic Service (VTS), serta yang di darat seperti Terminal Operating System (TOS), Multipurpose Terminal Operating System (MP-TOS), Car Terminal Operating System (CTOS), Autogate System, Single Truck Identification Data System (STID), Behandle Management System (BMS), dan dari sisi pelanggan seperti e-Service dikembangkan menjadi i-Hub sehingga dapat meminimalisir biaya logistik nasional, menurunkan risiko penipuan, dan bersaing dalam skala global.

REFERENCES

- ACFE. (2023). Fraud. Retrieved 25 April 2023, from <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>
- ACFE Global. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners, Inc.*, 1–88. Retrieved from <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>
- Bănărescu, A. (2015). Detecting and Preventing Fraud with Data Analytics. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 1827–1836. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01485-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01485-9)
- Bernard, H. R., Wutich, A., & Ryan, G. W. (2016). *Analyzing qualitative data: Systematic approaches*. SAGE Publication. California, USA: SAGE Publication.
- Corporate Secretary Division. (2023). Fraud Prevention Strategy in the Environment Port of Indonesia. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Deloitte. (2015). *Fighting corruption in the Maritime Industry*. Deloitte Touche Tohmatsu India

- Private Limited*. Retrieved from India: Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited: www.deloitte.com/in
- Embassy of The Republic of Indonesia, & In Athens, T. H. R. (2022). PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Persero. Retrieved 25 April 2023, from https://kemlu.go.id/athens/en/pages/resepsi_diplomatik_2022/5235/etc-menu
- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2022). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001 : 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187–209. Retrieved from <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Iswanto. (2015). Simplifikasi Sistem dan Prosedur di Pelabuhan Dapat Mengurangi Celah Penyimpangan dan Ekonomi Biaya Tinggi. *Bahari Jogja*, XIII, 1–20.
- KKBI. (2023). Fraud. Retrieved 25 April 2023, from <https://kbbi.web.id/curang>
- Pelindo. (2018). P-Good Application. Retrieved 26 April 2023, from <https://pgood.pelindo.co.id/>
- Pelindo. (2020). WhistleblowingSystem' 'Pelindo Bersih". Retrieved 26 April 2023, from <https://pelindobersih.whistleblowing.link/en/>
- Pelindo. (2021). *Annual Report*. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Pelindo. (2022a). *Board Manual Guidelines*. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Pelindo. (2022b). *Code of Business Ethics Guidelines*. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Pelindo. (2022c). *Good Corporate Governance Guidelines*. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Pelindo. (2022d). *Gratification Control Guidelines*. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Pelindo. (2022e). *Whistleblowing System Guidelines*. Jakarta, Indonesia: PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Safuan. (2018). FRAUD AND ANTI-FRAUD IN THE PORT SECTOR. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3, 145–152. Retrieved 16 February 2021 from <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.17>
- Safuan, S. (2023). Penerapan Teknologi Digital di Pelabuhan Indonesia untuk Menurunkan Biaya Logistik Nasional. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 9(3), 211. Retrieved from <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v9i3.738>
- Safuan, S., & Budiandru, B. (2019). Modus Kecurangan & Program Anti Kecurangan di Pelabuhan (Studi Kasus Pelabuhan di Jakarta). *Owner*, 3(2), 54. Retrieved from <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.131>
- Safuan, S., Budiandru, B., & Ismartaya, I. (2021). Fraud dalam Perspektif Islam. *Owner*, 5(1), 219–228. Retrieved from <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>
- Savilia, L., & Laily, N. (2020). AccountingStudents" Academic Fraud: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Business Education*, 5(September), 54–68. Retrieved from <https://doi.org/10.26675/jabe.v5i1.12569>
- Syofyan, R., & Putra, D. G. (2020). The Role of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in Indonesian Company. In *Proceedings of the 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)* (Vol. 124, pp. 819–825). Paris, France: Atlantis Press. Retrieved from <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.148>
- The Institute of Internal Auditors. (2009). IPPF – Practice Guide Internal Auditing and Fraud. IIA. USA: The Institute of Internal Auditors (IIA).
- Wibowo, K. M., & Pancawati, H. (2023). Can Internal Characteristics Prevent Fraud in Procurement of Goods and *Journal of Accounting and Business Education*, 7(March), 1–13. Retrieved from <https://doi.org/10.26675/jabe.v7i2.26771>